

P R A K A R S A *Policy Brief*

July 2019

Pesan Kunci:

- Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 24 juta jiwa (2018), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi lansia tinggi atau aging population country. Diperkirakan jumlah lansia akan melonjak menjadi 77 juta pada tahun 2050 atau sebanyak 23 persen dari total penduduk.
- 45 persen dari total jumlah lansia berada pada tingkat ekonomi miskin dan 67 persen diantaranya berada di tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah dan terlantar. 25 persen dari total jumlah lansia hidup bersama keluarga 3 generasi dengan status ekonomi miskin.
- Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi dan program yang tepat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak lansia dan untuk menghadapi ledakan penduduk lansia agar lansia memiliki standar hidup yang berkualitas.
- Perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia yang optimal dapat menekan angka kemiskinan secara makro dan mencegah kemiskinan pada generasi selanjutnya.

SEDIA PAYUNG SEBELUM RENTA: LANGKAH DINI ANTISIPASI LEDAKAN POPULASI LANSIA



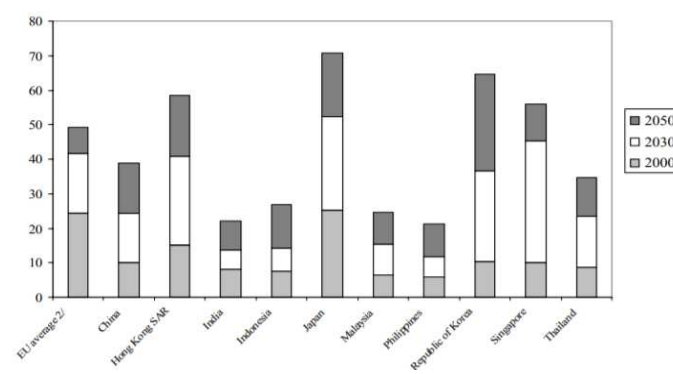
Transisi Demografi dan Tren Lansia

Populasi yang menua adalah fenomena global yang mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia. Pertambahan populasi lansia di negara berkembang dinilai lebih cepat dari pada di negara-negara maju. Sekitar 60 persen populasi masyarakat dunia di atas 65 tahun akan tinggal di Asia pada tahun 2030, menyebabkan sejumlah ekonomi di kawasan itu menghadapi tantangan demografis sebelum menjadi negara kaya (Kikuchi 2017). Pada tahun 2040, jumlah lansia di Asia akan melebihi total populasi masyarakat Eropa dan Amerika Utara.

Di kawasan Asia, beberapa negara seperti Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang, mengalami penuaan tercepat. Korea Selatan adalah negara dengan penuaan tercepat di antara negara mana pun di dunia

(Heller, 2017). Periode deviden demografis di Asia secara berurutan adalah China dan Thailand akan berlangsung pada sekitar 2035-2040, Malaysia dengan periode dividen demografis diperkirakan akan berlangsung sedikit lebih lama hingga 2045. Sedangkan India, Indonesia, dan Filipina akan menghadapi ledakan penduduk lansia sekitar tahun 2050 (Heller, 2006).

Tingkat Ketergantungan Usia Tua di Negara-Negara Asia Terpilih, 2000-2050



Sumber: Heller, M.P.S., 2006

Di Indonesia, jumlah populasi lansia pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 77 juta atau hampir seperempat total populasi. Peningkatan usia harapan hidup sebetulnya merupakan dampak positif dari pembangunan serta perbaikan kualitas hidup masyarakat seperti perbaikan nutrisi masyarakat dan meningkatnya layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah 71 tahun pada tahun 2018. Angka ini meningkat dari sebelumnya 68 tahun pada 2008 (Kemkes 2019; Sunusi 2008).

Kemiskinan pada Kelompok Lansia

Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia menjadi faktor tingginya jumlah lansia. Sampai saat ini, belum ada program perlindungan dan jaminan sosial yang komprehensif bagi kelompok lansia. Padahal, sebagian besar lansia berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang memprihatinkan. Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K 2017) menyatakan bahwa sekitar 45 persen lansia berada di rumah tangga dengan status sosial ekonomi 40 persen terendah dengan 67 persen diantaranya hidup dalam keadaan sangat miskin dan terlantar (TNP2K 2017).

Kondisi tersebut mengakibatkan lansia masih tetap bekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidup. Lebih dari 50 persen lansia di Indonesia masih bekerja, sebanyak 84 persen lansia pria berusia 60 – 64 tahun masih bekerja dan 75 persen lansia pria usia di atas 65 tahun masih bekerja. Sementara 60 persen lansia perempuan berusia 60 – 64 tahun masih bekerja dan 46 persen lansia perempuan berusia di atas 65 tahun masih bekerja. Bahkan, banyak dari lansia hidup dalam keluarga 3 generasi yang miskin dan mengharuskan mereka bekerja untuk membantu kebutuhan anggota keluarga yang lain. Selain itu, 30 persen lansia di Indonesia membiayai keluarga besar mereka dengan mentransfer uang dengan nilai transfer rata-rata sejumlah 950 ribu rupiah per bulan. Temuan ini menggarisbawahi fakta bahwa lansia juga berperan penting dalam memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga yang masih di usia produktif (TNP2K, 2013)

Bagi lansia yang tidak bekerja dan tidak memiliki jaminan pensiun, karena keterbatasan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah, lansia hidup dengan mengandalkan bantuan keuangan dan perawatan dari anak cucu. Konsekuensinya, lansia terkadang menjadi beban sosial dan ekonomi bagi anak cucunya. Hal ini berdampak pada anggota keluarga khususnya pada anak karena sumber daya yang ada harus terbagi untuk lansia sehingga investasi untuk kebutuhan nutrisi dan pendidikan anak menjadi tidak optimal. Pada tingkat kemiskinan yang ekstrem, anak terancam putus sekolah dan kurang gizi. Data TNP2K (2013) menyatakan hampir seperempat dari total pendapatan bulanan 57 persen lansia di Indonesia berasal dari keluarga. Angka ini lebih besar 16 persen dari rata-rata total upah yang didapat lansia.

Mengingat mayoritas lansia merupakan kelompok ekonomi rendah dan rata-rata dari lansia tinggal bersama keluarga miskin, maka jika pemerintah tidak memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar lansia, maka baik lansia ataupun keluarganya akan menghadapi kesulitan yang lebih buruk dan dapat mengakibatkan kemiskinan pada generasi selanjutnya.

Peluang dan Tantangan Negara Populasi Menua

Era bonus demografi yang sebentar lagi akan terjadi di Indonesia merupakan peluang untuk menggenjot perekonomian nasional. Puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada kurun waktu 2030 – 2040 di saat penduduk usia produktif (berusia 15–64 tahun) berjumlah lebih banyak dari pada penduduk usia tidak produktif (64 ke atas). Penduduk usia produktif Indonesia diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa (BAPPENAS, 2019).

Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, maka sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang unggul agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja dan dapat bekerja secara lebih produktif. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa *window of opportunity* bonus demografi di Indonesia cukup sempit yakni lebih kurang hanya akan terjadi dalam kurun 10 tahun. Selain itu, menurut (Bloom et al., 2011), bonus demografi tidak dapat berulang di dalam satu siklus demografi. Saat *window of opportunity* berakhir, perekonomian nasional secara otomatis akan mengikuti siklus demografi berikutnya yakni demografi menua. Pada akhirnya, penuaan populasi akan meningkatkan angka ketergantungan dan diprediksikan akan membawa dampak penurunan kinerja pada perekonomian (Bloom dan Finlay, 2009). Tanpa persiapan dini yakni adanya jaminan sosial seperti pensiun dan perlindungan kesehatan yang komprehensif, maka populasi yang menua akan sulit diantisipasi dampak negatifnya.

Melihat kondisi angkatan dan struktur kerja di Indonesia yang di dominasi oleh angkatan kerja yang rata-rata hanya lulus Sekolah Dasar (SD) dan berketerampilan rendah yang bekerja di sektor informal, lansia saat ini dan yang akan datang berpotensi berada dalam kondisi ekonomi rentan. Oleh karenanya, kebijakan dan program perlindungan lansia perlu segera dirumuskan dan diimplementasikan sehingga kondisi buruk bagi lansia dapat diantisipasi. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan dan program yang mampu mencegah lansia menjadi semakin miskin.

Perlindungan Lansia dan Pengurangan Kemiskinan

Perlindungan lansia di Indonesia dilaksanakan melalui dua bentuk yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial. Jaminan sosial diejawantahkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui program BPJS-Kesehatan dan Jaminan Sosial untuk Pekerja yaitu BPJS-Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan untuk lansia sampai pada 2018 (TNP2K, 2019) telah menjangkau 100 persen dari 40 persen kelompok ekonomi terbawah dan 84 persen dari total populasi lansia. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya menjangkau 12 persen dari total populasi lansia (TNP2K, 2019).

Adapun beberapa program bantuan sosial yang telah berjalan antara lain:

- 1) Beras Sejahtera (Rastra) untuk lansia, menjangkau sekitar 43 persen rumah tangga lansia.
- 2) Program Keluarga Harapan (PKH) lansia, menjangkau 4,25 persen rumah tangga lansia.
- 3) Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Program ini pada dasarnya diperuntukan untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas baik usia lansia ataupun non-lansia. tidak tersedia data spesifik jumlah lansia difable yang menerima bantuan ini. Namun, sejak 2018, ASPDB diintegrasikan ke dalam PKH.
- 4) Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), menjangkau hanya 1,08 persen dari total populasi lansia. seperti halnya ASPDB, pemerintah Indonesia telah menetapkan ASLUT untuk diintegrasikan ke dalam PKH.

Saat ini, total anggaran Program Bantuan Sosial secara umum adalah sekitar Rp43.4 triliun (di luar anggaran untuk peserta PBI-JKN) atau sekitar 0,32 persen dari total PDB dan 2 persen dari total APBN. Secara lebih rinci, data mengenai estimasi bantuan sosial khusus untuk lansia sejauh ini tidak tersedia. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah anggaran total untuk biaya bantuan sosial secara umum, maka dapat diestimasi bahwa alokasi anggaran untuk bantuan sosial lansia masih sangat rendah.

Program perlindungan sosial bagi lansia yang telah dijalankan cukup memberikan dampak positif pada kualitas hidup lansia dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Namun, nominal bantuan sosial perlu ditingkatkan mengingat biaya pengeluaran rumah tangga semakin tinggi. TNP2K (2018) mengusulkan penambahan nominal bantuan menjadi Rp.300.000 per bulan per lansia dengan dua pilihan skenario, pertama bantuan tunai tersebut diberikan semua lansia di atas 60 tahun yang berada di bawah 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Skenario kedua adalah seluruh populasi lansia di atas 70 tahun menerima bantuan tersebut. Dua skenario ini secara langsung diestimasi dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam skema satu, dengan perkiraan jumlah penerima manfaat sebanyak 10.300.688 lansia maka kemiskinan akan

berkurang dari sampai 7,4 persen. Adapun pengurangan kemiskinan untuk skenario kedua yang secara estimasi diberikan pada 7.659.165 lansia akan mengurangi kemiskinan sampai pada 3,5 persen.

Dalam pandangan Prakarsa, program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi lansia perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Meskipun jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) telah menjangkau seluruh penduduk yang berada pada 40 persen kelompok ekonomi terbawah, namun di kelompok lansia baru menasar 87 persen, namun masih terdapat 13 persen lansia yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan. Di sisi jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kondisinya jauh lebih memprihatinkan, baru 12 persen lansia yang terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. Ke depan, pemerintah harus segera meningkatkan jangkauan jaminan sosial yang menjangkau 100 persen kelompok lansia. Program bantuan sosial lansia yang ada juga masih belum memadai. Prakarsa memandang perlu adanya kenaikan bantuan sosial tunai bagi lansia. Besaran bantuan sosial tunai bagi lansia dapat disesuaikan dengan besaran garis kemiskinan nasional.

Pembiayaan dapat diambil dari APBN dan APBD, artinya pemerintah daerah berkontribusi dalam pemberian bantuan sosial tunai bagi lansia di wilayahnya masing-masing daerah. Sebagai perbandingan, Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan bantuan sosial tunai bagi lansia sebesar Rp600.000/bulan/lansia.

Rekomendasi Kebijakan

1. Dalam situasi di mana jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan lansia belum sempurna, maka pemerintah perlu menaikkan jumlah nominal bantuan sosial tunai kepada lansia agar kualitas hidup lansia terjaga dengan baik. Penambahan nominal bantuan sosial yang Prakarsa usulkan adalah Rp425.250/bulan/lansia. Nominal ini disesuaikan dengan angka garis kemiskinan nasional pada Maret 2019. Hal ini akan melindungi lansia dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan
2. Pemerintah perlu meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi dengan cara mengintegrasikan kerja-kerja pendampingan PKH dengan program ASLUT. Peningkatan kapasitas pendamping PKH menjadi salah satu prasyarat utama dan perlunya membuka partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam monitoring evaluasi terhadap program lansia. Monitoring evaluasi multipihak akan mampu mengatasi *exclusion error* and *inclusion error* sehingga program lansia menjadi lebih efektifitas dan berdampak baik
3. Pemerintah perlu segera membuka ruang bagi aktor non-pemerintah dalam kegiatan kajian atau *review regulasi* (revisi UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) dan review program perlindungan dan kesejahteraan lansia agar prioritas jangka menengah

(2020-2024) dan jangka panjang (2025-2050) dapat terumuskan dengan lebih baik. Selain itu, langkah ini juga akan mempermudah integrasi kebijakan program lansia. Harapannya, kita mampu memproyeksikan kebutuhan fiskal dalam melindungi lansia di masa yang akan datang saat Indonesia menghadapi ledakan penduduk tua

4. Pemerintah dan non-pemerintah perlu mengkaji persepsi dan ekspektasi anak muda mengenai masa pensiun untuk mempersiapkan kebijakan perlindungan lansia di masa yang akan datang yang sesuai dengan kebutuhan.

References

Adioetomo, Sri Moertiningsih, Fiona Howell, Andrea Mcpherson, dan Jan Priebe. 2013. "Asistensi Sosial Untuk Usia Lanjut Di Indonesia: Kajian Empiris Program Aslut". *Working Paper*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Heller, Peter. 2006. *Is Asia Prepared for an Aging Population?* (No. 6-272). International Monetary Fund.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. *Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan*.

https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf, diakses pada 2 Mei 2019.

Kikuchi, Tomomi. 2017. "Asia will be Home to 60% of World's Elderly by 2030s: Deloitte" dalam Nikei Asia Review.

<https://asia.nikkei.com/Economy/Asia-will-be-home-to-60-of-world-s-elderly-by-2030s-Deloitte>, diakses pada 17 Mei 2019.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. *Penduduk Lanjut Usia (Lansia) dan Keterjangkauan Program Perlindungan Sosial bagi Lansia*. Makalah dipresentasikan pada Presentasi BAPPENAS, 22 Agustus 2017.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2018. *Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lansia*. Makalah dipresentasikan pada Presentasi Internasional Tentang Perlindungan Sosial Bagi Lansia, 22 Mei 2018.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. *The Future of Indonesia Social Protection System: Social Protection for All*. Jakarta: TNP2K.

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

Perkumpulan Prakarsa Executive Director

Ditulis oleh :

- Herni Ramdlaningrum
- Adrian Chrisnahutama
- Eka Afrina Djamhari

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan independent tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
Fax +6221 781 1897
perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan Prakarsa adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **Prakarsa Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

Disclaimer:

Ringkasan kebijakan ini disusun untuk membangun kesadaran publik mengenai persiapan menghadapi ledakan penduduk lansia dan agar lansia memiliki standar hidup yang berkualitas. Ringkasan kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi tentang bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia. Prakarsa Policy Brief ini dapat dilaksanakan berkat dukungan Voice Indonesia - Hivos Southeast Asia kepada Perkumpulan PRAKARSA.